

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara merupakan persoalan multidimensi yang dipicu oleh beragam faktor yang saling berkaitan. Secara garis besar, penyebab utamanya meliputi: tekanan ekonomi dan kemiskinan, gaya hidup konsumtif yang didorong oleh kebiasaan berjudi daring dan konsumsi minuman keras, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Di samping itu, tingginya angka residivis hampir mencapai 100% menandakan bahwa sistem pemidanaan belum mampu memberikan efek jera yang memadai, khususnya karena hukuman bagi pelaku pertama kali masih tergolong ringan. Keterlibatan anak-anak dan remaja dalam tindak pidana juga semakin memperburuk situasi, terutama akibat lemahnya pengawasan keluarga dan minimnya program pemberdayaan generasi muda.
2. Dari sisi kelembagaan, Polres Bengkulu Utara memperlihatkan kinerja yang cukup baik dalam aspek penegakan hukum (represif) dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 70–80%. Namun dalam aspek pencegahan (preventif), masih terdapat sejumlah kelemahan, antara lain: belum terintegrasinya fungsi pencegahan dengan fungsi penyidikan, keterbatasan infrastruktur pengawasan seperti CCTV berkualitas, serta pendekatan lintas instansi yang belum optimal.

B. Saran

1. Lembaga pemasyarakatan perlu meningkatkan kualitas program rehabilitasi agar narapidana benar-benar memiliki bekal keterampilan dan kesiapan mental sebelum kembali ke tengah masyarakat, sehingga siklus residivis dapat ditekan secara nyata. Di sisi lain, penanggulangan kejahatan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat kepolisian. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan sektor swasta perlu bersatu dalam menangani akar permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, serta dampak sosial dari judi daring dan penyalahgunaan zat yang terbukti menjadi pendorong utama terjadinya tindak pidana ini.
2. Polres Bengkulu Utara perlu mengintegrasikan fungsi pencegahan dan fungsi penyidikan secara lebih terpadu, sehingga keduanya tidak berjalan secara terpisah. Pemasangan kamera pengawas beresolusi tinggi di titik-titik rawan, peningkatan kapasitas penyidik di bidang forensik digital, serta intensifikasi program perlindungan generasi muda menjadi langkah konkret yang mendesak untuk segera direalisasikan. Pembiayaan infrastruktur keamanan ini dapat dikerjakan bersama melalui skema kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha swasta yang turut berkepentingan terhadap keamanan wilayah.